

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL  
KEIMIGRASIAN OLEH MAHASISWA ASING DI INDONESIA**



**OLEH :**

**EDWIN SETYAWAN**

**NIM : 02112045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Penguji .....</b>	<b>iv</b>
<b>Berita Acara Bimbingan Skripsi .....</b>	<b>v</b>
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>viii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xii</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>Latar Belakang dan Rumusan .....</b>	<b>1</b>
1. 1      Penjelasan Judul	6
1. 2      Alasan Pemilihan Judul	7
1. 3      Tujuan Penelitian	7
1. 4      Manfaat Penelitian	8
1. 5      Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Masalah	9

3. Sumber Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	12

## **Bab II Bentuk dan Pengawasan Terhadap Mahasiswa Asing yang**

### **Masuk Wilayah Indonesia**

<b>2.1</b>	<b>Prosedur Izin Keimigrasian di Indonesia.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Tata Cara Keimigrasian Masuk Wilayah Indonesia...16</b>	
<b>2.1.2</b>	<b>Tata Cara Keimigrasian Keluar Wilayah Indonesia...19</b>	
<b>2.2</b>	<b>Bentuk Pengawasan Terhadap Orang Asing yang Masuk dan Keluar di Wilayah Indonesia .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Bentuk dan Cara Pengawasan Orang Asing di Wilayah Indonesia.....</b>	<b>26</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Pengawasan Orang Asing di Indonesia.....</b>	<b>27</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Cara-Cara Orang Asing Memperoleh Izin tinggal di Indonesia.....</b>	<b>33</b>
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan dan Kewajiban Mahasiswa Asing Selama Berada di Wilayah Indonesia.....</b>	<b>34</b>

#### **2.3.1 Prosedur Bagi Warga Asing yang akan menjadi**

#### **Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.....35**

**2.3.2 Kewajiban dan Sanksi Penjamin Mahasiswa Asing . 36**

**2.3.3 Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) ..... 38**

**Bab III Sanksi Pidana terhadap Pelanggar Izin Tinggal Keimigrasian**

**oleh Mahasiswa Asing di Indonesia**

**3.1 Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal oleh Mahasiswa Asing  
di Indonesia ..... 41**

**3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal oleh  
Mahasiswa Asing di Indonesia ..... 44**

**3.2.1 Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal oleh Mahasiswa  
Asing di Indonesia dan Kategorinya ..... 53**

**3.2.2 Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal oleh  
Mahasiswa Asing di Indonesia dan Kategorinya ..... 56**

**Bab IV Penutup**

**Kesimpulan ..... 59**

**Saran ..... 60**

**Daftar Pustaka**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang keimigrasian Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 yang mengatur tentang izin tinggal dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan pelanggaran izin tinggal keimigrasian oleh mahasiswa asing di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif, dimana peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011, dimana tentang penanganan penyalahgunaan dan pelanggaran izin tinggal keimigrasian sudah berjalan dengan maksimal, tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal terbatas. (2) upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan pelanggaran izin tinggal keimigrasian maka dilakukan tindakan yuridis di serahkan kepada kepolisian lalu diproses sampai di pengadilan, kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan tindakan administratif. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban umum seperti yang di jelaskan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Kata kunci : Pelanggaran, Keimigrasian, Mahasiswa Asing.

## **ABSTRACT**

*This study aims to investigate the implementation of the Immigration Act the Government of the Republic of Indonesia No. 6 of 2011, which regulates the residence permit and to determine the response to criminal acts of abuse and residence permit immigration by foreign students in Indonesia.*

*This research method is implemented with the normative, where researchers conducted a literature study by way of examining the books , literatur , and legislation relating to matters that will be discussed in the thesis writer .*

*The findings obtained from this study include: (1) the implementation of the Law of the Republic of Indonesia No. 6 in 2011, with about handling abuse and violators of residency immigration has been running with the maximum, but there are several obstacles that occur within the system implementation of the completion of a issue a limited residence permit. (2) the response to the crime of abuse and violation of residence permit the immigration dilakukan judicial action submitted to the police and then processed through the court, and may be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of applicable law, or by administrative action. Immigration officials authorized to conduct immigration adminitratif actions against foreigners in Indonesia which could jeopardize the security and public order as described in Law No. 6 of 2011 on immigration.*

*Keywords: Abuse, Immigration, Foreign Students.*



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penulisan skripsi ini , dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Indonesia sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. dari pengamatan pada kasus-kasus yang ada, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih bersifat *non-pro justitia*. Yang dapat tindakan keimigrasian yang salah satunya dilakukan deportasi. Hal ini dikarenakan mengingat adanya upaya banding, kasasi, atau grasi yang dimiliki oleh warga asing apabila ditempuh dengan cara *pro justitia*. Dalam hal ini pengawasan pelanggaran izin tinggal ada beberapa undang-undang yang mengatur seperti halnya undang-undang nomor 6 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing, banyak aspek yang menunjang dalam pengawasan orang asing, namun harus ada pihak yang saling koordinasi antar instansi negara yang dapat membantu dalam pengawasan orang asing. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, mengingat dana operasional dari negara yang sangat terbatas. Karena menurut politis dan ekonomis cara tindakan keimigrasian dianggap lebih praktis dan efisien. Kecuali masalah penyalahgunaan izin tersebut menyangkut masalah peredaran narkoba, terorisme dan perdagangan manusia

(*human trafficking*), maka jalan *pro justitia* yang harus ditempuh agar menimbulkan efek jera bagi warga asing yang melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.

Upaya mencegah terjadinya suatu tindakan yang melanggar ketentuan Izin tinggal

Keimigrasian dibedakan atas 2 cara, yaitu :

- a. Pencegahan secara Preventif;
- b. Pencegahan secara Represif

Dalam hal pencegahan ini sangat erat kaitanya dengan hal pengawasan baik wisatawan asing masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan secara *preventif* adalah tindakan pencegahan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana Imigrasi dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. Sedangkan dalam pencegahan *represif* ini dapat dilakukan dengan cara pemidanaan, deportasi maupun dimasukan ke dalam daftar cegah dan tangkal (*cekal list*).

2. Sanksi Pelanggaran izin tinggal di Indonesai ini diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dimana banyak peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, keputusan menteri, dan peraturan perundang-undangan yang menunjang. Dalam hal ini sanksi yang dikenakan harus diklasifikasikan sesuai dengan pelanggarannya, banyak sekali macam pelanggaran yang dapat terjadi pada orang asing, mulai dari tidak melaporkan data, penyalahgunaan izin tinggal, narkoba, teroris dan lain-lain.



## B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah

:

1. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Indonesia seharusnya lebih di perhatikan tentang pengawasan orang asing yang datang di wilayah Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal. Pengawasan yang lebih ketat dimulai pada saat pemberian Visa, lebih diutamakan tujuan orang asing masuk ke Indonesia dengan jaminan apabila mereka melanggar Izin Tinggal akan dikenakan tindakan atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam pemberian tanda masuk bagi orang asing di tempat pemeriksaan imigrasi lebih teliti dalam proses pemeriksaan baik dokumen maupun visa yang ada, pengawasan di lapangan lebih memperhatikan bagi tempat-tempat untuk orang asing yang banyak tinggal apakah sesuai dengan Visa yang mereka gunakan saat tinggal di Indonesia.

Lalu yang terakhir lebih fokus pada kantor imigrasi bagi yang mengurus perpanjangan Visa agar lebih berkoodinasi dengan Instansi terkait guna melakukan pemeriksaan terkait dengan tujuan/kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut sehingga orang asing tersebut melakukan perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian. Dan juga diadakan penindakan secara hukum bagi oknum petugas atau pejabat imigrasi yang ikut serta dalam membantu melakukan tindak pidana keimigrasian tersebut. Demikian juga yang penting dengan dilengkapi peralatan dan sistem yang mampu melakukan koordinat di titik-titik rawan orang asing yang tinggal di suatu wilayah lengkap dengan data diri, dokumen perjalanan yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dan tidak hanya memberikan sosialisasi terhadap orang asing atau mahasiswa asing, namun setiap instansi terkait, penegak hukum juga harus di berikan sosialisasi juga

mengenai mekanisme keimigrasian, dengan begitu semua instansi terkait dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan baik dalam rangka menciptakan kenyamanan dan keamanan negara.

Dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Izin tinggal Keimigrasian khususnya dengan melakukan cegah dan tangkal (*cekal list*) hendaknya mencerminkan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga mengkoordinasikan tindakan cekat agar dapat dengan cepat dilaksanakan sebelum orang yang dimaksud tidak mengganggu ketertiban umum, bahaya negara dan melarikan diri.

2. Sanksi pidana harusnya jangan terlalu memperkuat di sistem deportasi maupun kurunagn penjara, mengingat biaya negara yang harus di dikeluarkan cukup besar dan di anggap menjadi beban negara, harusnya pemerintah Indonesia harus memperkuat di sistem sanksi denda administratif, selain menguntungkan negara ini akan menjadikan efek jera dan berfungsi menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh negara di bidang keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU ATAU JURNAL ILMIAH

Ajad Sudrajad Havid, Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM thn 2008

M.Imam Santoso, *“Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”*, UI Press Jakarta, 2004

Yoyok Adi Saputra, *”Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 ”*. USU Repository 2009

Abdullah sjahrifun, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghella Indonesia, Jakarta, 2012

Wahyu Ukun, Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian,(Jakarta: PT.Adi Kencana Aji,September 2004),

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2005 tentang visa, izin masuk dan, izin keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing;

Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2011;

Keputusan Menteri Kehakiman M.02.PW-09.02 Tahun 1995 tentang tata cara pengawasan orang asing;

Keputusan Menteri Kehakiman M.02.PW-09.02 Tahun 1994 tentang pengajuan keberatan;

Keputusan Menteri Kehakiman M.02.PW-09.02 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan orang asing tentang penindakan orang asing;

Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-undang hukum acara pidana;

Undang-undang 12 Tahun 2001 tentang kewarganegaraan negara;

Petunjuk pelaksana Direktur Jenderal imigrasi: F-307.12.01.01 Tahun 1995 tanggal 15 Maret.

#### **DAFTAR MEDIA INTERNET**

[http://febribsa.blogspot.co.id/p/blog-page\\_16.html](http://febribsa.blogspot.co.id/p/blog-page_16.html)

<http://daerah.sindonews.com/read/1043078/189/langgar-izin-tinggal-4-mahasiswa-timor-leste-dideportasi-1441879218>

<http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-terbatas-itas>

<http://www.jdi.kemenkeu.go.id/fullText/2011/6TAHUN2011UU.htm>

<http://www.kopertis12.or.id/2013/12/08/panduan-untuk-calon-mahasiswa-asing-yang-akan-studi-di-indonesia.html>

<http://www.tanyahukum.com/internasional/93/prosedur-keluar-masuk-wilayah-indonesia-berdasarkan-peraturan-keimigrasian>

<http://www.djpp.depkmham.go.id/inc/buka.php>

<http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/547433/.pdf>

[www.fh.ugm.ac.id/kewajiban/penjamin/mahasiswaasing](http://www.fh.ugm.ac.id/kewajiban/penjamin/mahasiswaasing)

[www.kemenkumham.go.id/pembentukan-TIMPORA](http://www.kemenkumham.go.id/pembentukan-TIMPORA)